



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

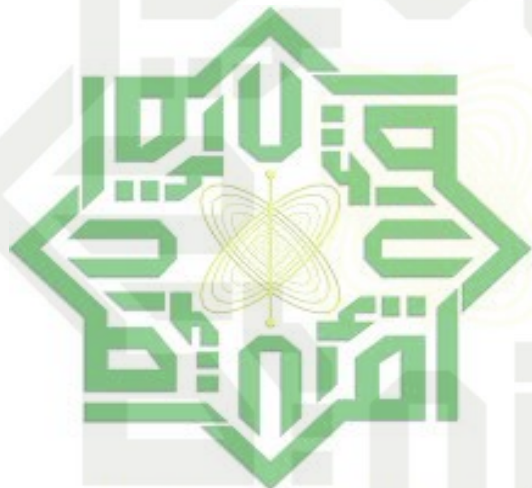
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8
TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MUHAMMAD IKHSAN
NIM : 11527100008

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul "*Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam-Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*" yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
 NIM : 11527100008
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2020

Pembimbing Skripsi


MUSLIM, S.Ag, SH., M.Hum

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

: PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG
BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

: **MUHAMMAD IKHSAN**
: 11527100008
: ILMU HUKUM

: Telah dimunaqasyahkan pada :
: / Tanggal : Senin / 11 Mei 2020
: Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Yuni Marlina, M.Sy
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Nur Hayat, SH., MH
(Anggota Penguji)
4. Dr. Abu Samah, MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pendirian rumah ibadah ini sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dimana dalam pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Masalah pokok dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan perizinan rumah ibadah menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Kemudian Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak dapat ditetapkan, proses penelitian berlangsung dari satu informan ke informan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya bangunan rumah ibadah yang tidak memiliki surat izin, sehingga ini menimbulkan konflik antar jamaah akibat dari tidak adanya izin mendirikan bangunan tersebut. Dan hal ini tidak lepas dari kurangnya kesadaran pada masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), serta Kurangnya informasi dan sosialisasi (komunikasi) yang disampaikan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi terhambat. Sosialisasi peraturan sudah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat buku pedoman dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Namun ketidak berhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini tidak terlepas dari kurangnya pendekatan dan komunikasi yang baik kepada masyarakat yang melaksanakan kebijakan, sehingga kebijakan tidak berjalan. Hal ini sudah tentu menjadi hambatan karna untuk menjalankan suatu kebijakan salah satu hal yang sangat penting. Dengan adanya informasi dan sosialisasi yang baik dan tepat, maka suatu kebijakan akan tersampaikan dan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staa Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi inidengan judul “PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMAPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi oleh Allah swt.

Penulisan skripsi ini ialah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tinggimya kepada:

1. Ayahanda Aripin dan Ibunda Indrawati, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. Serta Kakek, Nenek, Paman dan Tante penulis serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang terkhususkan untuk saudara-saudari penulis yaitu, Nurbaiti Janati, dan yang lain yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin , M.Ag selaku Rektor, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A.Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ahmad Supardi MA selaku Wakil Rektor II, Drs H. Promadi, MA., Ph.D. selaku Wakil rektor III dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar,M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr, H.Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau,yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan .
4. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim,S.Ag, SH,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum FakultasSyari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Ilham Akbar, SHI, SH, MH selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Muslim, S.Ag, SH, M.Hum selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak H. Muhammad Nazar sebagai ketua seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Dahlan Jamil. MA sebagai sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Joenafriko. ST. M. Eng sebagai ketua seksi perencanaan tata ruang kota pekanbaru yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Ibuk Rein Rizka Karvy, S. STP, M. SI selaku kepala kelurahan simpang baru yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses pengambilan data sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
13. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah swt membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

Wassalam.

Pekanbaru, 10 November 2019

Penulis

MUHAMMAD IKHSAN

11527100008

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A . Latar Belakang Masalah	1
B . Batasan Masalah.....	10
C . Rumusan Masalah	10
D . Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E . Metode Penelitian.....	12
F . Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A .Gambaran Umum Kota Pekanbaru	18
1 . Sejarah Kota Pekanbaru	18
2 . Keadaan Alam Kota Pekanbaru (Geografis)	19
3 . Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru (Demografi)	21
4 . Keadaan Agama Masyarakat Kota Pekanbaru.....	22
5 . Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kota Pekanbaru	23
6 . Visi dan Misi.....	24
B .Gambaran Umum Kecamatan Tampan	25
1 . Sejarah Kecamatan tampan.....	25
2 . Keadaan Alam Kecamatan Tampan (Geografis)	27
3 . Keadaan Penduduk Kecamatan Tampan (Demografi)	29
4 . Keadaan Agama Masyarakat Kecamatan Tampan	30
5 . Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Tampan	31
6 . Visi dan Misi.....	32
C .Gambaran Umum Kelurahan Simpang Baru	32
1 .Sejarah Kelurahan Simpang Baru	32
2 .Struktur Organisasi Kelurahan Simpang Baru.....	33
3 .Keadaan Agama Masyarakat Kelurahan Simpang Baru	34
4 .Visi dan Misi Kelurahan Simpang Baru.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A .Teori Implementasi	36
B .Teori Perizinan	40
C .Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-undangan	46
D .Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat	52

BAB IV PEMBAHASAN

A . Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.	58
B . Faktor Penghambat Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.....	67

BAB V PENUTUP

A . Kesimpulan	71
B . Saran	72

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	14
Tabel II. 1	Luas Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan.....	21
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru.....	22
Tabel II.3	Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya Di Kota Pekanbaru.....	23
Tabel III.4	Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Segi Mata Pencaharian.....	24
Tabel II.5	Luas Kecamatan Tampan Berdasarkan Luas Kelurahan.....	29
Tabel II.6	Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Kelurahan.....	30
Tabel II.7	Sarana Tempat Rumah Ibadah Kecamatan Tampan.....	31
Tabel II.8	Keadaan Penduduk Kecamatan Tampan Ditinjau Dari Segi Mata Pencaharian.....	32
Tabel II.9	Struktur Organisasi Kelurahan Simpang Baru.....	35
Tabel II.10	Keadaan Agama Masyarakat kelurahan Simpang Baru.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat beragam baik dalam hal suku, budaya, dan agama. Proteksi kebebasan beragama dalam negara yang sangat plural seperti Indonesia ini membutuhkan kebijakan yang unggul dan non-diskriminatif. Sebaliknya, hadirnya kebijakan-kebijakan yang buruk dan diskriminatif akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan, yang akhirnya bermuara pada konflik antar agama.

Apabila pemerintah Indonesia gagal membuat kebijakan yang unggul dalam bidang kehidupan antar agama di Indonesia, maka taruhannya adalah disintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kebijakan yang diskriminatif akan berdampak panjang, yakni kian menipisnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Indonesia hanya bisa menjadi bangsa yang toleran dan terus memelihara toleransi antar agama jika kebijakan yang dihasilkan terkait dengan kehidupan bersama agama-agama adalah kebijakan-kebijakan yang unggul dan tentu saja dapat di implementasikan.¹

Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, sebagai negara hukum, Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama tertentu dan tidak juga beraliran negara sekuler yang tidak mepedulikan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi keberadaan agama

¹Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT Gramedia, 2009), h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan didukung secara konstitusional.²

Rumah ibadah bagi setiap agama merupakan pusat kegiatan dan kebudayaan. Oleh karena itu, keberadaan rumah ibadah merupakan kebutuhan bagi setiap umat beragama. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan beribadah, maka dibuat peraturan yang menjadi landasan pokoknya yang terdapat tentang masalah pemeliharaan kerukunan, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang merupakan substansi yang dimuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pada dasarnya masalah pendirian rumah ibadah bermuara pada dua hal. *Pertama*, pendirian rumah ibadah yang diterima masyarakat dengan damai. *Kedua*, pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan perselisihan seputar pendirian rumah ibadah, antara lain: Pembangunan rumah ibadah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadah bersama secara rutin tanpa izin sementara, memanipulasi administrasi dan tanda tangan pengguna rumah ibadah dan dukungan warga.³

² A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006), h. 1.

³ M. Yusuf Asry, *Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat Studi Kehidupan Keagamaan), h. xxiv.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan sarana dan prasarana ibadah terutama dilakukan atas peran serta masyarakat yang mencerminkan besarnya kesadaran beragama masyarakat. Atas prakarsa dan swadaya masyarakat yang makin meningkat, jumlah tempat peribadatan terus bertambah sehingga diharapkan akan semakin memudahkan dan memberikan perasaan nyaman dan khusus bagi setiap umat dalam menunaikan ibadahnya. Dengan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana ibadah ini, maka kesempatan umat beragama untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing makin luas. Dalam rangka membina kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa yang harmonis, kegiatan musyawarah antar umat beragama terus ditingkatkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi antara lain musyawarah antar umat beragama, musyawarah antara umat berbagai agama, dan musyawarah cendekiawan berbagai agama.

Pendirian rumah ibadah berarti membangun rumah ibadah baru, termasuk yang diperbarui dalam arti lain renovasi. Sebagaimana ketentuan yang berlaku renovasi berarti perubahan sehingga diperlukan kembali IMB. Dengan demikian pendirian rumah ibadah disini dilihat dari berapa faktor: a) penggunaan rumah ibadah, b) dukungan masyarakat setempat, c) rekomendasi tertulis dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota, d) rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten/Kota, e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah dari bupati/walikota dan diluar lima tersebut; f) masalah kepentingan.⁴

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru,

⁴M. Yusuf Asry, *Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusatlitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. Xxiv.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.⁵ Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan keamanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Izin Mendirikan Bangunan juga akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya Izin Mendirikan Bangunan menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan juga dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Pembangunan rumah ibadat tidaklah semata-mata untuk keperluan ibadat ritual saja, tetapi juga untuk melakukan aktivitas sosial yang dianggap senafas dengan pemahaman agama itu sendiri serta mempunyai hak bagi pemeluk suatu pemahaman itu sendiri.

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.⁶

Perizinan yang diberikan dalam mendirikan bangunan dipenuhi sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Pada Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 tentang Persyaratan Bangunan Gedung menyebutkan bahwa:⁷

⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 160.

⁷ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung
2. Persyaratan Administratif Bangunan Gedung meliputi:
 - a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. Status kepemilikan Bangunan Gedung, serta
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi;
 - a. Persyaratan teknis Bangunan gedung dan lingkungan yang terdiri atas;
 - 1) Persyaratan peruntukan lokasi;
 - 2) Intensitas Bangunan Gedung;
 - 3) Arsitektur Bangunan Gedung;
 - 4) Pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu, serta
 - 5) Rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk kawasan yang termasuk dalam Peraturan Walikota tentang RTBL.

Adapun dasar hukum untuk pembangunan gedung menurut Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 Ayat 1 adalah:

- a. Pancasila.
- b. Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
- c. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Undang-undang Nomor: 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pelaksanaan pengembangan pembangunan diatur oleh otonomi daerah, karena penata ruang adalah tanggung jawab yang bersangkutan. Dengan demikian setiap daerah memiliki peraturan tentang proses Izin Mendirikan Bangunan.⁸

Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara khusus menjamin adanya perlindungan atas rumah-rumah ibadah yang digunakan oleh warga. Hak untuk membangun rumah ibadah merupakan perwujudan dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagaimana hak untuk menggunakan dan memasang simbol agama/keyakinan, dan menjalankan hari libur keagamaan/keyakinan.⁹

Apabila kita mengacu pada dasar negara sila pertama Pancasila dan Pasal 9 Konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945, Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang “monotheist” karena pernyataan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa dapat ditafsirkan demikian. Atas dasar inilah,

⁸ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), h. 10.

⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Jakarta: Center of Academic Publishing Service, 2007), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara agama karena dalam konstitusi tidak dinyatakan bahwa negara didasarkan atas suatu agama tertentu, tetapi Indonesia juga bukan merupakan negara sekuler yang memperhatikan permasalahan agama dan menyerahkan masalah agama pada perorangan dan masyarakat.¹⁰

Meskipun begitu dalam prakteknya, Indonesia hanya mengakui keberadaan enam agama yang dikenal sebagai agama” resmi” yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, serta satu aliran kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa. Keenam agama tersebut berada dibawah Departemen Agama, sedangkan diluar enam agama tersebut pembinaan berada dibawah Departemen Pariwisata. Agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan asli nusantara juga tidak dimasukkan kedalam kategori agama.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 buah pulau, dan luas wilayah Indonesia seluruhnya mencapai 4.193.252 km².¹¹ Dan jumlah penduduknya kurang lebih 237.641.334 jiwa dengan beragam suku budaya dan agama. Sampai dengan tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Muslim yaitu sebanyak 87%, Kristen Protestan 7%, Katolik 3%, Hindu 1.7%, Budha 0.7%, Konghucu 0.05%, sedangkan Aliran-aliran kepercayaan lainnya sebanyak 0,45%.¹² Jika dilihat dari kuantitas penganut agama

¹⁰Sigit Ardianto, 2009, *From Secularism into Modified Pluralism: Comprehensive Application of John Rawls's Justice as Fairness Theory in Defining State and Religion Relationship*, Cornell law Library.

¹¹ Wedo Utami dan Suyami, *Rangkuman Pengetahuan Umum lengkap* (Bandung: CV, Tiara Ilmu, 2008), Cetakan ke-1, h. 7.

¹²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia#/search

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka akan terlihat adanya agama yang tergolong dalam kelompok mayoritas dan agama-agama yang termasuk dalam kelompok minoritas.

Perbedaan yang cukup signifikan antara golongan mayoritas dan minoritas ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan pelanggaran kebebasan beragama. Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini adalah masalah izin pembangunan rumah ibadah. Permasalahan tentang rumah ibadah ini merupakan salah satu motif dari berbagai tindakan anarkis yang dilakukan atas dasar agama yang mengatas namakan kuantitas dari penganut agama tertentu.

Pendirian rumah ibadat secara fisik berkaitan dengan kepentingan umum, terutama peruntukkan sebuah lokasi dikaitkan dengan berbagai kepentingan, termasuk tata ruang. Menurut Mieke Komar, pengaturan tata ruang sepenuhnya bersifat publik atau menjadi bagian integral dari aspek yuridis kenegaraan maupun kemasyarakatan. Adanya keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan menjadi logis karena subyek penataan ruang pada dasarnya menyangkut pemerintah, orang seorang, kelompok orang atau badan hukum.

Peraturan tentang perizinan pendirian rumah ibadah ini diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Berdasarkan ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini untuk membangun sebuah rumah ibadah pemeluk agama harus memenuhi persyaratan berupa:¹³

1. Adanya keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa (Pasal 13 ayat (1) SKB 2 menteri Nomor 9 Tahun 2006).
2. Pendirian rumah ibadah sendiri harus pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. Rekomendasi tertulis kepada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/ Kota.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersediannya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Melihat dari banyaknya rumah ibadah yang ada di Kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini, masih terdapat banyaknya rumah ibadah yang tidak memiliki surat izin mendirikan rumah ibadah

¹³ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan ini menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

B . Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan, maka penulis akan membatasi masalah ini yakni berfokus kepada permasalahan Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

C . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Eldi Putra, *Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pekanbaru*, 15 Agustus 2019

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Perizinan pendirian Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum tata negara, khususnya pemahaman teoritis tentang pelaksanaan perizinan pendirian rumah ibadah.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan perizinan pendirian rumah ibadah.

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Diarag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan obsevasi mencari data yang diperlukan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan obsevasi mencari data yang diperlukan.¹⁵

Kemudian sifat dari penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, Sistematis, dan Akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan/ peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang, benda, kejadian kasus-kasus, waktu

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h.14.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama,¹⁶ Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Adapun metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah Total Quota Sampling, yaitu menjadikan seluruh Populasi menjadi Sampel, dan penulis juga menggunakan metode Simple Random Sampling, yaitu mengambil sebagian dari populasi menjadi sampel.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1.	KasiPerencanaan Tata Ruang Kantor Dinas Tata Ruang dan Banguan Kota Pekanbaru	1	1	100%
	Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru	1	1	100%
	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru.	1	1	100%
	Kepala Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru	1	1	100%
	Ketua Seksi Bagian Penegakan	1	1	100%

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) h.121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-Undangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru			
---	--	--	--

4 Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung terhadap Perizinan Pendirian Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang kami peroleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum atau dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primier dan skunder, misalnya, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.¹⁷

Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

¹⁷Op.cit, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden dilapangan, yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Selain itu Wawancara, juga merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada para responden.¹⁸

Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dari kepustakaan.

- d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data.

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan semua, baik itu data sekunder, primer maupun sekunde, lalu dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari masalah pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Didalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan yaitu secara deduktif, prosedur deduktif ialah bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.¹⁹

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cetakan. ke-4, h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan pembahasan didalam skripsi ini ialah disusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari lima Bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah singkat kantor tempat peneliti melakukan penelitian.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori pelaksanaan, perizinan, dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang kajian hasil penelitian data dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan selama penelitian berlangsung meliputi pelaksanaan perizinan bangunan gedung terhadap pembangunan rumah ibadah di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lamabat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Mesjid Raya Sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang.

Usaha yang telah dirinti tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar Dan Kampar), negeri Senapelan digamti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

2. Keadaan Alam Kota Pekanbaru (Geografis)

Wilayah kota pekanbaru sangat strategis, terletak ditengah-tengah pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan jalur perhubungan darat dan laut diseluruh kawasan.

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Di Riau daratan, posisi Kota Pekanbaru bisa dikatakan ditengah-tengah wilayah. Dengan letak yang demikian, membuatnya menjadi cukup strategis sebagai Ibu Kota Provinsi Riau. Sedangkan batas-batasnya secara administratif adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.²⁰ Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan, kecamatan itu antara lain adalah: Kecamatan Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai.

²⁰Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018*, h.3.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,26 Km. Untuk mengetahui secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel II.1
Luas Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Luas(Km)	Persentase(%)
1.	Tampan	59,81	9,46%
2.	Payung sekaki	43,24	6,84%
3.	Bukit raya	22,05	3,49%
4.	Marpoyan damai	29,74	4,70%
5.	Tenayan raya	171,27	27,09%
6.	Limapuluh	4,04	0,64%
7.	Sail	3,26	0,52%
8.	Pekanbaru kota	2,26	0,36%
9.	Sukajadi	3,76	0,59%
10.	Senapelan	6,65	1,05%
11.	Rumbai	128,85	20,38%
12.	Rumbai pesisir	157,33	24,88%
Jumlah		632,26	100%

Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah kecamatan yang terluas adalah kecamatan tenayan raya yakni 171,27 Km atau 27,09% , sedangkan yang paling sempit adalah kecamatan pekanbaru kota yakni 2,26 Km atau 0,36%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. UIN SUSKA RIAU

3. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru (Demografi)

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai.²¹ Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapatkan perhatian. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah(jiwa)	Persentase(%)
1.	Tampan	285.932	26,21%
2.	Payung sekaki	90.902	8,33%
3.	Bukit raya	103.722	9,51%
4.	Marpoyan damai	131.362	12,04%
5.	Tenayan raya	162.530	14,90%
6.	Limapuluh	42.469	3,89%
7.	Sail	22.015	2,02%
8.	Pekanbaru kota	25.719	2,36%
9.	Sukajadi	48.544	4,45%
10.	Senapelan	37.459	3,43%
11.	Rumbai	67.570	6,20%
12.	Rumbai pesisir	72.864	6,68%
Jumlah		1.091.088	100%

Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019

²¹Ibid, h. 57.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta ini milik UIN SUSKA RIAU

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terpadat terdapat di wilayah kecamatan tampan dengan jumlah 285.932 jiwa atau sekitar 26,21% dari jumlah keseluruhan jumlah penduduk, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah sail yaitu 22.015 jiwa atau 2,02% dari jumlah keseluruhan penduduk kota pekanbaru.

4. Keadaan Agama Masyarakat Kota Pekanbaru

Masyarakat kota pekanbaru menganut agama yang dianut sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya. Oleh karena itu dapat kita lihat pada tabel agama yang berlaku di kota pekanbaru sebagai berikut:

Tabel II.3

Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya Di Kota Pekanbaru

No	Agama	Jumlah(jiwa)	Persentase(%)
1.	Islam	943.768	86,50%
2.	Kristen Khatolik	58.350	5,35%
3.	Kristen protestan	69.458	6,36%
4.	Hindu	4.647	0,42%
5.	Budha	11.733	1,07%
6.	Kong hu cu	3.132	0,29%
Jumlah		1.091.088	100%

Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa agama islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk kota pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah keseluruhan, yaitu 1.091.088 jiwa, sebanyak 943.768 atau sebanyak 86,50% jiwa

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan pemeluk agama islam, selebihnya adalah pemeluk agama kristen protestan, kristen katolik, budha, hindu dan kong hu cu.

5. Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kota Pekanbaru

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga. Masyarakat kota pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap individu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian penduduk kota pekanbaru yang selanjutnya diikuti oleh sektor-sektor lain seperti industri dan buruh/tukang. Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan penduduk ditinjau dari mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4

Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Segi Mata Pencaharian

No	Agama	Jumlah(jiwa)	Persentase(%)
1.	Sektor pertanian	23.431	6,45%
2.	Industri	50.229	14,45%
3.	Sektor perdagangan	109.476	31,79%
4.	Sektor jasa	26.851	7,73%
5.	Pns/Abri/Polri	31.184	8,79%
6.	Wiraswasta	28.566	8,21%
7.	Buruh/tukang	36.358	10,46%

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	Lain-lain	41.476	11,94%
Jumlah		347.573	100%

Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar penduduk kota pekanbaru bermata pencaharian dibidang perdagangan, baik pedagang besar maupun pedagang kecil yakni berjumlah 109.476 jiwa atau 31,79%, sedangkan mata pencaharian yang terkecil adalah sektor pertanian berjumlah 23.431 jiwa atau 6,45%.

6 . Visi dan Misi

Visi dari pemerintah kota pekanbaru tahun 2021 adalah:

“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pusat Pendidikan Dan Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”

Misi dari pemerintah kota pekanbaru adalah:

- a. Menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif dengan berbasis ekonomi kerakyatan;
- b. Menyediakan sekolah dan lembaga pendidikan yang unggul dan didukung tenaga profesional, sehingga dapat menghasilkan sumberdaya yang berkualitas mandiri, kreatif dan inovatif;
- c. Melestarikan membina dan mengembangkan kebudayaan melayu yang mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan jati diri sehingga tercipta masyarakat maju, mandiri dan mampu bersaing dengan kebudayaan lain;

- d. Terpenuhi segala kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat;
- e. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui pendidikan agama dan mefungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembidan umat.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tampan

1. Sejarah Kecamatan tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah + 199.792 KM².

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :

Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu, Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu, Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

Terbentuknya Kecamatan Tampan mempunyai sejarah yang perlu kita ketahui, dengan meningkatnya perkembangan pembangunan diberbagai sektor di Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peranan dan fungsi aspek kehidupan, dalam rangka tertib administrasi pemerintah mampu menggerakkan langkah pembangunan yang terus meningkat di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menganggap perlu diadakan pemekaran wilayah, oleh karna itulah keluar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pekanbaru Kota Serta Batas-Batas Dan Luas Wilayah.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003, Wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru), Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar), Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru), Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar).

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 4 Kelurahan Yaitu : Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Delima. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tampan dimekarkan dari 4 Kelurahan menjadi 9 Kelurahan dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru), Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar), Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru), Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 9 Kelurahan Yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
5. Kelurahan Tobek Godang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
6. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
7. Kelurahan Air Putih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
8. Kelurahan Tuah Madani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan Kel. Tuah Karya)
9. Kelurahan Sialang Munggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Tuah Karya).

2. Keadaan Alam Kecamatan Tampan (Geografis)

Kecamatan tampan merupakan kecamatan dikota pekanbaru yang berfografi didaratan. Kecamatan tampan ini berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di kota pekanbaru, yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai/ Siak Hulu, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun luas Wilayah dari kecamatan tampan mencapai 59,81 Km² dengan masing-masing kelurahan. Untuk mengetahui secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel II.5

Luas Kecamatan Tampan Berdasarkan Luas Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah (jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Delima	2877	5.76
2.	Tobek Godang	5670	4.64
3.	Simpang Baru	1939	7.15
4.	Bina Widya	2017	7.06
5.	Air Putih	4171	6.44
6.	Tuah Madani	2170	4.52
7.	Tuah Karya	7238	5.28
8.	Sialang Munggu	10220	5.70
9.	Sidomulyo Barat	8554	7.90
	Jumlah	44846	54.44

Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah kelurahan yang terluas adalah kelurahan sidomulyo barat yakni 7.90 Km², sedangkan yang paling sempit adalah kelurahan tuah madani yakni 4.52 Km².

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

3. Keadaan Penduduk Kecamatan Tampan (Demografi)

Pertumbuhan penduduk kecamatan tampan merupakan salah satu hal yang patut mendapatkan perhatian. Diperkirakan jumlah penduduk kecamatan tampan berdasarkan kelurahan untuk saat ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel II.6

Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah(jiwa)
1.	Delima	2877
2.	Tobek Godang	5670
3.	Simpang Baru	1939
4.	Bina Widya	2017
5.	Air Putih	4171
6.	Tuah Madani	2170
7.	Tuah Karya	7238
8.	Sialang Munggu	10220
9.	Sidomulyo Barat	8554
Jumlah		44846

Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terpadat terdapat di wilayah kelurahan sialang munggu dengan jumlah 10220 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk, sedangkan kelurahan dengan jumlah penduduk terkecil adalah simpang baru yaitu 1939 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk kecamatan tampan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

4. Keadaan Agama Masyarakat Kecamatan Tampan

Masyarakat kecamatan tampan menganut agama yang dianut sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya. Oleh karena itu dapat kita lihat pada tabel agama yang berlaku di kecamatan tampan sebagai berikut:

Tabel II.7

Sarana Tempat Rumah Ibadah Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Tempat Ibadah				
		Masjid	Mushala	Gereja	Lainnya	Jumlah
1.	Delima	30	8	2	-	40
2.	Simpang Baru	51	21	6	-	78
3.	Tuah Karya	48	19	-	-	67
4.	Sidomulyo Barat	33	18	-	-	51
	Jumlah	162	66	8	-	236

Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa masjid dan mushala adalah suatu tempat rumah ibadah yang paling banyak dianut orang/ penduduk kecamatan tampan. Hal ini terlihat dari jumlah keseluruhan, yaitu sebanyak 162 masjid, 66 mushala, dan 8 gereja. Dan masjid dan mushala ini merupakan pemeluk agama islam, selebihnya adalah pemeluk agama kristen protestan, kristen katolik, budha dan hindu.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik HINUSKA Riau

5. Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Tampan

Untuk menompang hidupnya, penduduk kecamatan tampan yang terdiri dari 9 kelurahan yaitu: Kelurahan Delima, Tobek Godang, Simpang Baru, Bina Widiya, Air Putih, Tuah Madani, Tuah Karya, Sialang Munggu, dan Kelurahan Sidomulyo Barat. Pada umumnya kecamatan tampan ini mayoritas hidupnya dengan mata pencaharian berdagang tetapi selain itu juga ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri, karyawan swasta, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan penduduk ditinjau dari mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8

Keadaan Penduduk Kecamatan Tampan Ditinjau Dari Segi Mata Pencaharian

No	Agama	Jumlah(jiwa)	Persentase(%)
1.	Sektor pertanian	169	1,41%
2.	Industri	214	1,79%
3.	Sektor perdagangan	3.821	31,98%
4.	Sektor jasa	663	5,55%
5.	Pns/Abri/Polri	971	8,13%
6.	Wiraswasta	3.741	31,31%
7.	Lain-lain	2.369	19,83%
Jumlah		11.948	100%

Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar penduduk kota pekanbaru bermata pencaharian dibidang perdagangan, baik pedagang besar maupun

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang kecil yakni berjumlah 3.821 jiwa atau 31,98% sedangkan mata pencaharian yang terkecil adalah sektor pertanian berjumlah 169 jiwa atau 1,41%

6. Visi dan Misi

Visi dari kecamatan tampan adalah:

“Terdepan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Terbaik Pemberian Pelayanan Publik Sekecamatan Kota Pekanbaru”

Misi dari kecamatan tampan adalah:

- a. Mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya pelayanan secara prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, bertanggung jawab serta berjiwa profesionalisme.
- c. Melaksanakan koordinasi disetiap line terkait dengan penciptaan komunikasi yang efektif diantara aparatur kecamatan.
- d. Meningkatkan kerjasama, loyalitas dan integritas didalam jiwa setiap aparatur kecamatan.

C. Gambaran Umum Kelurahan Simpang Baru

1. Sejarah Kelurahan Simpang Baru

Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu dari 4 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tampan, terdiri atas 34 RW dan 153 RT yang mempunyai Luas Wilayah 23.788 ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2016, Kelurahan Simpang Baru di bagi menjadi 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Tobek Godang, dan Kelurahan Tuah Madani.

Adapun batas wilayah antar Kelurahan Simpang Baru yaitu: Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan tobek godang, Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan air putih, Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan bina widya, Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan tuah karya. Dengan jumlah penduduk dikelurahan sebanyak 39.001 jiwa yaitu: Jumlah penduduk laki-laki sebanyak: 19.889 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 19.112 jiwa.

2 . Struktur Organisasi Kelurahan Simpang Baru

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan saat ini di kepalai oleh Ibu Rein Rizka Karvy, S.STP, M.SI sebagai Lurah. Dengan struktur pemerintahan sebagai berikut :

Tabel II.9

Struktur Organisasi Kelurahan Simpang Baru

NO	NAMA	JABATAN
1	REIN RIZKA KARVY, S.STP. M, SI	Kepala Lurah
2	JUSEMBRA OSNI, S.STP	Sekretaris Lurah
3	ROSLAINI	Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
4	HARMILA	Seksi Kesejahteraan Sosial
5	M. FAISAL SOFYANTO, SE	Seksi Pemerintahan, Keamanan Dan Ketertiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Keadaan Agama Masyarakat Kelurahan Simpang Baru

Masyarakat kelurahan simpang baru menganut agama yang dianut sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya. Oleh karena itu dapat kita lihat pada tabel agama yang berlaku di kecamatan tampan sebagai berikut:

Tabel II.10

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	10.002Orang	9.873Orang
Kristen	1.159Orang	1.157Orang
Katholik	1.387Orang	1.382Orang
Hindu	0Orang	0Orang
Budha	198Orang	187Orang
Khonghucu	0 Orang	0 Orang
Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa	0 Orang	0 Orang
Aliran Kepercayaan Lainnya	0 Orang	0 Orang
Jumlah	12.746 Orang	12.599 Orang

Sumber : Data Lapangan setelah diolah, 2019

4. Visi dan Misi Kelurahan Simpang Baru

Adapun Visi dari Kelurahan Simpang Baru adalah:

Visi :

- Terwujudnya Kelurahan Simpang Baru sebagai pusat pendidikan yang berazaskan iman dan taqwa;

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terwujudnya Kelurahan Simpang Baru sebagai pusat perekonomian yang berbasis kerakyatan.

Misi :

1. Memberikan akses pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.





BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.²²

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²³ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan

²² Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h. 117.

²³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁴

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.²⁵

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek

²⁴ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2004), h. 39.

²⁵ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, h. 1.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Faktor Keberhasilan Implementasi

Sebagaimana telah dikatakan oleh pakar, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecah permasalahan yang dihadapi.

D.L. Weimer dan Aidan R. Vining menyatakan setelah mempelajari berbagai literatur tentang implementasi, menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah diterapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hakekat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama telah merupakan suatu *assembling produktif*.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.²⁶

3. Faktor Penghambat Implementasi

Menurut Jan Merse mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:²⁷

1. Informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman visi dan misi dan kebijakan yang dirumuskan. Terjadinya kekurangan informasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.
2. Isi kebijakan implementasi dapat dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketetapan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.
3. Dukungan, sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

²⁶ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 59.

²⁷ Tangkilisan, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Gava Media, 2004), h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembagian potensi yaitu pembagian potensi antar para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang.

Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya dimana tujuan telah tercapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

B . Teori Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku masyarakat.²⁸ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin secara luas dan sempit.²⁹

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yaitu bahwa dalam waktu tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang

²⁸Pilipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 2.

²⁹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disangkutan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.³⁰

Selain itu, untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku orang atau badan yang sifatnya preventif adalah melalui izin. Ada beberapa bentuk yang sifatnya mengandung pengertian izin, seperti dispensasi, izin dan konsesi. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Koneksi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur tangan.³¹ Sjachran Basah mengartikan izin sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal *concreto* berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.³²

³⁰N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), h. 239.

³¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2016), Cetakan Ke-III, h. 105.

³² Sjachran Basah dalam Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Selain itu izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.³³

1. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Izin bersifat bebas

Adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang menerbitkan tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

- b. Izin yang bersifat terikat

Adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitnya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasan dan wewenanganya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

³³ S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Izin yang bersifat menguntungkan.

Merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi maka keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugrah kepada yang bersangkutan.

- d. Izin yang bersifat memberatkan

Merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.

- e. Izin yang segera berakhir

Merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek.

- f. Izin yang berlangsung lama

Merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama.

- g. Izin yang bersifat kebendaan

Merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

2. Unsur-unsur Perizinan:

Perizinan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana didalamnya

harus termuat unsur-unsur antara lain:³⁴

- a. Instrumen Yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan

³⁴Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 201-202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan peristiwa konkrit, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Pembuatan dan penertiban ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas legalitas, tanpa dasar wewenang tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjahrani Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkrit dan individual, peristiwa konkrit artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan

perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberian izin.

3. Fungsi Izin Mendirikan Bangunan

Adapun fungsi dari izin mendirikan bangunan sebagai berikut:

a. Segi teknis perkotaan

Pemberian izin mendirikan bangunan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah guna mengatur, menetapkan, dan merencanakan pembangunan. Dengan adanya IMB diharapkan tidak memberikan dampak negative bagi lingkungan. Sehingga lingkungan kota tertata dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib dan nyaman.

b. Segi kepastian hukum

Izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan perumahan. Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan rumah selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketenteraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.

Selain itu, izin mendirikan bangunan tersebut bagi si pemiliknya dapat berfungsi antara lain sebagai berikut:

- Bukti milik bangunan yang sah
- Kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat hukum.
- 2) Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 3) Segi pendapatan daerah, dalam hal ini pendapatan daerah maka izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sektor pemasukan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Melalui pemberian izin ini dapat dipungut retribusi izin mendirikan bangunan. Retribusi atas izin mendirikan bangunan itu ditetapkan berdasarkan persentase dari taksiran biaya bangunan yang dibedakan menurut fungsi bangunan tersebut. Retribusi izin mendirikan bangunan dibebankan kepada setiap orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam surat izin yang dikeluarkan itu.

C . Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.³⁵

Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatanyang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.

³⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2017), Cetakan. 16, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan kepada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.

Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin* atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift*.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dirumuskan pula tentang kedua pengertian tersebut dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, yang dirumuskan sebagai berikut:³⁶

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Walaupun Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 memberikan penjelasan terhadap istilah proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan produk dari proses pembentukan peraturan perundang-

³⁶*Ibid*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan dalam definisi tersebut, namun penulis berpendapat bahwa pengertian tersebut perlu diberikan catatan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengenai pengertian Peraturan Perundang-undangan dalam definisi tersebut terdapat hal-hal yang tidak tepat, yaitu:
 - a. Penulisan kata “perumusan” dan “teknik penyusunan” adalah perumusan yang berlebihan (duplikasi), oleh karena dalam melakukan perumusan Peraturan Perundang-undangan setiap perancang akan selalu mengikuti teknik penyusunan yang telah ditetapkan.
 - b. Pemakaian istilah “pengesahan” dalam definisi tersebut berakibat yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan hanyalah yang lain tidak memerlukan pengesahan. Sebaiknya dituliskan “pengesahan atau penetapan”.
2. Unsur-unsur Peraturan Perundang-undangan

Mengenai Peraturan Perundang-undangan terdapat beberapa unsur yaitu:³⁷

- a. Merupakan suatu keputusan yang tertulis.

Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka dalam rangka memenuhi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang, juga untuk “menjembatani” antar lingkup laku aneka adat dan hukum tidak tertulis lainnya, atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal pihak-pihak menghendakinya.

³⁷ Ibid, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Adapun penegasan tersebut perlu dikemukakan oleh karena suatu lembaga negara yang diakui oleh pejabat yang berwenang dan diakui oleh Undang-undang Dasar 1945.

- c. Mengikat umum

Yang dimaksud mengikat secara umum dan ini diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Berbicara mengenai hirarki Peraturan Perundang-undangan, maka kita tidak dapat lepas dari teori Hans Kelsen yang sangat terkenal yakni Teori Stufenbau.

Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).³⁸

³⁸ Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, (Makassar: Keretakupa, 2017), Cetakan Pertama, h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut dikemukakan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang telah mengalami perubahan selama ini, mulai sejak masa orde lama hingga sekarang.

Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:³⁹

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri;
7. Peraturan- peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:
 - a. Peraturan Menteri;
 - b. Instruksi Menteri;
 - c. Dan lain-lainnya.

Dalam era reformasi tata urutan perundang-undangan diatur dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, adalah sebagai berikut:

³⁹*Ibid*, h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah.

Selanjutnya Tap MPR Nomor III/MPR/2000, oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diganti dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan sebagai pengganti Tap MPR No.III/MPR/2000. Adapun tata urutan Perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tata urutan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

1. Tinjauan Tentang Peraturan Menteri

Peraturan Menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang Menteri yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya. Bila ditinjau dari tata urutan Perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang ditegaskan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/ MPRS/ 1966 maka bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia terdiri dari:⁴⁰

- (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- (3) Undang-Undang/ Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Keputusan Presiden;
- (6) Peraturan Pelaksana yang lain seperti:
 - a) Peraturan Menteri;
 - b) Instruksi Menteri;
 - c) Dan lain-lain.

Berdasarkan tata urutan perundangan tersebut, Peraturan Menteri merupakan Peraturan Perundang-undangan terendah dari pemerintah pusat. Menteri hanya boleh membuat aturan dalam bidang tugas Departemen (kementriannya).

2. Tinjauan tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006

Peraturan Bersama ini lengkapnya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

⁴⁰Skripsi Dwiyanto Budi Santoso, *Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Pasal 22 Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kota Surakarta, (Surakarta: 2007), h. Xxxii.*

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar pembuatan Peraturan Bersama ini tentu saja merujuk kepada Undang Jaminan tersebut dirumuskan pada Undang-undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴¹

Pada Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan bersama ini disebutkan bahwa rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagipara pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Dalam konteks ini rumah ibadat seperti masjid, gereja, kelenteng, vihara, mestilah memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan simbol masing-masing rumah ibadat agama bersangkutan.

Mengenai pendirian rumah ibadat dalam Perber ini dicantum pada pasal tersendiri, yaitu Pasal 13 sampai dengan Pasal 20. Pada Pasal ini dijelaskan mengenai ketentuan pendirian rumah ibadat sebagai berikut:⁴²

Pasal 13 Ayat (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

⁴¹ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴² Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kabupaten/kota atau provinsi.

Pada Pasal 13 di atas dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadat mestilah atas dasar keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk.

Pasal 13 Ayat (1) secara eksplisit menginginkan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan rumah ibadat ril yang diinginkan, sehingga antara penduduk dan masyarakat penganut betul-betul seimbang sevara proporsional.

Pasal 14 Ayat (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

(a) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa. (c) Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan d.Rekomendasi tertulis Forum Koordinasi Umat Beragama Kabupaten/Kota.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15: Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, diadukan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16 Ayat (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2) Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

Pasal 17: Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18 Ayat (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/Walikota dengan memenuhi persyaratan: a. kelayakan fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

huruf b, meliputi:(a) Izin tertulis pemilik bangunan;(b). Rekomendasi tertulis Lurah/Kepala Desa;(c) Pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota; dan (d) pelaporan tertulis kepada kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 19 Ayat (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota. (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud padaAyat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20 Ayat (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1)Dapat dilimpahkan kepada camat (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat(1)dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor Departemen Agama KabupatenKota dan FKUB Kabupaten/Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah dalam prosedur pengurusan perizinan bangunan gedung rumah ibadah, masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini kemukakan bahwa masih banyaknya bangunan rumah ibadah yang belum ataupun yang tidak mempunyai izin, mulai dari pendaftaran melalui online maupun melalui secara administrasi. Dan banyaknya terjadi pendirian rumah ibadah tanpa adanya izin dikarenakan masalah internal didalam suatu peribadatan, seperti aliran-aliran yang ada didalam suatu peribadatan itu sendiri. Sehingga konflik mengenai pendirian rumah ibadat ini banyak terjadi karena beberapa permasalahan, diantaranya: persyaratan pendirian rumah ibadat, perizinan rumah ibadat, pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan untuk mengatur pendirian rumah ibadat, dan lain-lain.
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah ibadah yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan, dan ini tidak lepas pula dari kewenangan pemerintah dalam melakukan sosialisasi belum berjalan dengan baik, sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang peraturan yang mengenai tentang izin mendirikan bangunan itu wajib ada dalam setiap

bangunan. Dan tidak adanya pendataan kembali mengenai izin bangunan gedung sehingga masih ada bangunan gedung yang belum mempunyai izin bahkan tidak mempunyai izin mendirikan bangunan tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah Daerah seharusnya memberikan sosialisasi yang lebih optimal kepada masyarakat terkait pentingnya izin bangunan rumah ibadah, karena masih ada masyarakat yang belum paham sehingga ini berdampak pada pelaksanaan perizinan rumah ibadah itu sendiri. Dan pihak pemerintah seharusnya mengundang pihak kecamatan dan pihak kelurahan dan RT maupun RW yang akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada masyarakat. Dan dalam hal ini perlu adanya tindak lanjut dari kecamatan maupun kelurahan seperti evaluasi atau pendataan kembali bangunan rumah ibadah mana yang belum mempunyai izin, agar diundang menghadiri sosialisasi yang diadakan.
2. Agar pelaksanaan sosialisasi pembuatan izin mendirikan bangunan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar, sebaiknya pegawai atau pejabat yang berwenang dalam masalah perizinan bangunan gedung melakukan sosialisasi decara formal maupun informal dengan rutin agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya izin mendirikan bangunan itu.
3. Supaya pelaksanaan perizinan bangunan gedung rumah ibadah meningkat, maka sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi keseluruh pelosok wilayah kelurahan simpang baru dan menggunakan media seperti pamphlet atau browser sehingga dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya izin mendirikan bangunan rumah ibadah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Amosudirdjo, S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Ary, M. Yusuf Ed, *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia Pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011)
- Basah, Sjahran, dalam Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2010)
- Farida, Anik Dkk, *Konflik dan Penyelesaian Pendirian Rumah Ibadah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Desain Trio, 2015)
- Hadjon, Plilipus M, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993)
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Inrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2017)
- Malik, M. Luthfi, *Etos Kerja, Pasar, Dan Masjid*, (Jakarta: LP3ES, 2013)
- Moonti, Roy Marthen, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, (Makassar: Keretakupa, 2017)
- Negroho, Riant, *Public Policy*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009).
- Polong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Ridwan, Juniarso dan Sodik, Achmad, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Nuansa, 2016)
- Rosyadi, Rahmad A dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Setiawan, Guntur, *Implemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Sudhaan, N. H. T, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Suggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Public*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ta'gkilisan, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004)
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002)
- Utami, Wedo dan Suyami, *Rangkuman Pengetahuan Umum lengkap*, (Bandung: CV Tidar Ilmu, 2008)
- Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Wharno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Jakarta: Center of Academic Publishing Service, 2007).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umat Beragama, Pembeardayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah Ibadat

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan
Gedung

Jurnal

Adianto, Sigit, *From Secularism into Modifed Pluralism: Comperehensive Application of John Rawls's Justice as Fairness Theory in Defining State and Religion Relationship*, Jurnal law Library, 2007.

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008

Aslati, *Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama Dikota Pekanbaru*, Jurnal Toleransi Media Komunikasi Umat Beragama, Volume , Nomor 2 Juli-Desember 2014

Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990

Nisa Sumika Putri, *Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 2, Mei 2011

Supriyanti Dwiyanto Budi Santoso, *Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Pasal 22 Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Studi Di Kota Surakarta*, Surakarta: 2007

Supriyanti, Ina Shaskia Melanif, "Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dikecamatan Jagakarsa", Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia#/search

[https://Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018](https://Badan_Pusat_Statistik_Kota_Pekanbaru,_Kota_Pekanbaru_Dalam_Angka_2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ikhsan
 NIM : 11527100008
 Tempat/Tanggal Lahir : Centai, 20 Mei 1997
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 20 Juni 2020
 Yang membuat pernyataan

MUHAMMAD IKHSAN
 NIM. 11527100008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Dikeluarkan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ditulis oleh saudara :


Nama	: MUHAMMAD IKHSAN
NIM	: 11527100008
Program Studi	: Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: Kamis/ 25 Juli 2019
Narasumber	: Lovelly Dwina Dahan, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2019

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber


Endang S. Sos. MM
NIP. 19680226 199103 2 002


Lovelly Dwina Dahan, SH, MH
NIP. 19820622 201101 2 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8109/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
NIM : 11527100008
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 7 OKTOBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 10 Oktober 2019
Dekan,



Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SYARAT- SYARAT PENDIRIAN MASJID DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. SURAT PERMOHONAN
2. SUSUNAN PENGURUS
3. INVENTARIS MASJID
4. NAMA-NAMA IMAM, GHARIM DAN KHATIB
5. DENAH LOKASI MASJID
6. DAFTAR NAMA-NAMA JAMA'AH
7. PHOTO COPY KTP JAMA'AH
8. SERTIFIKAT TANAH
9. REKOMENDASI DARI MASJID TETANGGA
10. REKOMENDASI DARI LURAH
11. REKOMENDASI DARI KUA
12. REKOMENDASI DARI CAMAT
13. REKOMENDASI DARI FKUB KOTA PEKANBARU
14. REKOMENDASI DARI KEMENAG KOTA PEKANBARU
15. PENGESAHAN DARI WALIKOTA PEKANBARU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 10 Maret 2017
Kepala
KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PEKANBARU
H. MUHAMMAD NAZAR, S.Ag
NIP. 196701011997031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : fsihuinriau@gmail.com

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: No. 04/F.I.1/PP.00.9/5738/2019

Pekanbaru, 10 Juli 2019

: Kepada

: Mohon Izin Melakukan PraRiset

: Kepada

: Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

: Tempat

: Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama	: MUHAMMAD IKHSAN
NIM	: 11527100008
Semester/Tahun	: IX (Sembilan)/ 2019
Program Studi	: Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 Oktober 2019

04/F.I/PP.00.9/8171/2019

Siswa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD IKHSAN
NIM	: 11527100008
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Kementerian Agama Kota Pekanbaru Jl. Rambutan No.1 Simpang Arifin ahmad Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Pelaksanaan perizinan pendirian rumah ibadah menurut peraturan bersama menteri agama
dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 dikelurahan simpang baru kecamatan
tampan kota pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/26762
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.C.H/PP.00.50.6171/2019 Tanggal 11 Oktober 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD IKHSAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11527100008 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
2. DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU
3. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA PEKANBARU
4. KANTOR SATPOL PP KOTA PEKANBARU
5. KANTOR KELURAHAN SIMPANG BARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Oktober 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARIFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



232018

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3129

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/26762 tanggal 15 Oktober 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MUHAMMAD IKHSAN**
NIM : 11527100008
Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Jenjang : **S1**
Alamat : **NYATUH DESA BATANG MERANTI KEC. PULAU MERBAU KAB. KEPULAUAN MERANTI-KEPULAUAN RIAU**

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Lokasi Penelitian : 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU
2. SATPOL PP KOTA PEKANBARU
3. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
4. KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
5. FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA PEKANBARU

Adapun ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berperilaku sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Oktober 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si
NIP. 19690701 198909 1 001

Penyusunan :

Yth : 1. Dean Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

2. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Dt. Setiamaharaja No. 2 Kec. Bukit Raya - Pekanbaru Telp. (0761) 571524 -571530)

Pekanbaru, 20 November 2019

Kepada Yth;
Fak. Syariah dan Hukum
Uin Suska Riau
Di-

Pekanbaru

: 772/DPU-PR/SEK/XI/2019
: Biasa
: -
: Telah Melaksanakan Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sehubungan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/26762 Tanggal 24 Oktober 2019, Perihal Rekomendasi Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Berkenan hal diatas, kami beritahukan :

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
NIM : 11527100008
JURUSAN : ILMU HUKUM

Telah melaksanakan Riset dengan Judul ("PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN KAMPAN BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU").

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi terimakasih.

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU
Sekretaris

A. SAAT, ST. MT
Pembina Tk.I

NIP. 19611203 198503 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Jalan Jenderal Sudirman Telepon 31543 - 38765
PEKANBARU - 28126

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP/2019/281

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 01/BKBP-REKOM/2019/3129 Tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa yang bernama :

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
NIM : 11527100008
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.1 ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

“PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU.”

Demikian Surat Keterangan Riset/Penelitian ini kami keluarkan supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 November 2019

**SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**

H. EDY RIZAL S.Sos

Pembina Tk I NIP. 19660317-198602 1 00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor.1. Pekanbaru 28294

Telp. 0761 66513, 66504, 61802 Faximile 66513

Email: tu.pekanbaru@yahoo.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor B-6309/kk.04.5/TL.00/11/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H. Edwar S Umar, M. Ag
NIP : 1965090619993031003
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Dan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ikhsan
NIK : 11527100008
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Jurusan : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Alamat : Jl. Swakarya

Telah melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru pada Seksi Bina Islam pada Tanggal 05 Nopember Tahun 2019 , dengan judul :

PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERKAITAN DENGAN KEMENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU "

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 November 2019

Kepala

Edwar S Umar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA PEKANBARU - RIAU

Komplek Kant. Kementerian Agama Pekanbaru, Jl. Arifin Achmad-Rambutan Pekanbaru

Pekanbaru, 06 Desember 2019

Nomor: 02/FKUB-PKU/XII/2019

Telah Melaksanakan Riset

Kepada Yth.
Fak. Syariah dan Hukum
UIN Suska Riau

di-
Pekanbaru

Dengan hormat,

Sehubungan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor:071/BKBP-REKOM/2019/3129 tertanggal 24 Oktober 2019 Perihal Rekomendasi Penelitian di Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru.

Berkenan hal diatas, kami beritahukan:

Nama : MUHAMMAD IKHSAN
NIM : 11527100008
JURUSAN : ILMU HUKUM

Telah melaksanakan Riset dengan Judul: ("PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU")

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi terimakasih.

Pengurus
DR. H. ISMARDI ILYAS, MA
Ketua
DR. H. DAHLAN JAMIL, MA
Sekretaris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN
KELURAHAN SIMPANG BARU**

Alamat HR. Subrantas Km 13.5 No. Telp.

Pekanbaru 28293

Pekanbaru, 06 September 2019

Kepada Yth :
Ketua RW dan Ketua RT
Se- Kelurahan Simpang Baru

di-

PEKANBARU

Berkenaan dengan Surat dari Camat Tampan Nomor : 65/KT/X/2019 perihal Izin riset / penelitian. Bersama ini kami minta Saudara kiranya untuk dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian terhadap surveyor lapangan :

Nama : MUHAMMADS IKHSAN
NIM : 11527100008
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ILMU HUKUM
Jenjang : S.1
Jual Penelitian : PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

LURAH SIMPANG BARU



REIN RIZKA KARVY, S.STP,M.Si
NIP. 19910521 201206 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD IKHSAN

NIM : 11527100008

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*

Pembimbing : Muslim, S.Ag, SH, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Muhammad Ikhsan, lahir di Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, 20 Mei 1997. Merupakan anak pertama dari Pasangan Bapak Aripin dan Ibu Indrawati. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 40 Centai, Desa Batang Meranti dan lulus pada tahun 2009, melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hidayatul Muftadiin Semukut dan lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Hidayatul Muftadiin semukut dan lulus pada tahun 2015.

Selanjutnya penulis meneruskan pendidikannya ke perguruan Tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum.

Selama perkuliahan Penulis memiliki pengalaman magang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2017 yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, dan penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2018 di Desa Raantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Selain itu Penulis juga aktif mengikuti suatu organisasi yaitu Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI).

Pada tahun 2020 Penulis melaksanakan Penelitian Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan Judul “ Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Pada tanggal 11 Mei 2020 Penulis melaksanakan ujian Munaqasyah / sidang skripsi dan dinyatakan lulus dengan nilai IPK 3,17 Predikat Sangat Memuaskan serta menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).